Journal of Public Administration Review
https://journal.uir.ac.id/index.php/jpar Vol. 1 No. 2 Desember 2024

Peranan Lembaga Pemberdayaan Masyarakat (LPM) Dalam Pembangunan Di Kampung Tualang Kecamatan Tualangkabupaten Siak

Jeffin Helman Gunawan[1] Evi Zubaidah[2]

Administrasi Publik, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Islam Riau, Jl. Kharudin Nasution No. 133 Perhentian Marpoyan, Pekanbaru, Indonesia
jeffinhelmangunawan@student.uir.ac.id evizubaidah@soc.uir.ac.id

Received : July 31, 2024;
Accepted : 10 August 2024

Abstract

The A role is a series of behaviors that a person is exposed to in accordance with the appropriate portion given either formally or informally. This research aims to find out the role of Community Empowerment Institutions (LPM) in village development. The research, which was located at the Penghulu Kampung Tualang Office, used descriptive research methods with a qualitative approach, as well as data collection techniques using interviews, observation and documentation. The research results of the Facilitator, Mediator, Motivator and Dynamisator indicators from the data analysis carried out by the researchers showed that the function of Community Empowerment Institutions (LPM) in village development has not played a optimal role. Therefore, there needs to be better attention from the Community Empowerment Institution (LPM) so that the function of the Facilitator to socialize, mobilize and invite the community to participate can be better and for the community to be able to participate directly in the Community Empowerment Institution (LPM). in development or other programs in Tualang Village, Tualang District, Siak Regency.

Key Words : Role of Community Empowerment Institutions

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis dan mengetahui Efektivitas Penyuluhan Peranan adalah serangkaian perilaku yang dihadapkan pada seseorang sesuai dengan porsi sesuai yang diberikan baik secara formal atau nonformal. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana peranan dari Lembaga Pemberdayaan Msayarakat (LPM) dalam pembangunan Kampung. Penelitian yang berlokasi di Kantor Penghulu Kampung Tualang mengunakan metode penelitian deskriktif dengan pendekatan kualitatif, serta dengan teknik pengunpulan data yang dilakukan dengan teknik wawancara, observasi, dan dokumentasi. Hasil penelitian dari indikator Fasilitator, Mediator, Motivator dan Dinamisator dari analisis data yang peneliti lakukan diperoleh gambaran bahwa fungsi Lembaga Pemberdayaan Masyarakat (LPM) dalam pembangunan Kampung belum berperan maksimal. Maka dengan itu perlu adanya perhatian lebih baik lagi dari pihak Lembaga Pemberdayaan Masyarakat (LPM) agar fungsi Fasilitator untuk mensosialisasikan, menggeraakan dan mengajak serta masyarakat dalam berpartisipasi bisa lebih baik lagi serta kepada masyarakat agar dapat berpartisipasi secara langsung dalam Lembaga Pemberdayaan Masyarakat (LPM) baik dalam pembangunan atau program lainnya yang ada di Kampung Tualang Kecamatan Tualang Kabupaten Siak.

Key Words : Peranan Lembaga Pemberdayaan Masyarakat

Pendahuluan

Pemerintah daerah berwenang untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan menurut asas otonomi dan tugas pembantuan. Pemberian otonomi luas kepada daerah diarahkan untuk mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan pelayanan, pemberdayaan dan peran serta masyarakat. Pembangunan pada dasarnya bertujuan untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia, termasuk penciptaan iklim yang mendorong tumbuhnya prakarsa dan swadaya masyarakat. . Oleh karena itu, pembangunan harus dilakukan secara terencana dengan baik dan harus menyentuh kebutuhan riil masyarakat Desa. Sehingga pembangunan yang dilakukan dikawasan Desa dapat menyeluruh terhadap masyarakat.

LPM Lembaga Kemasyarakatan yang tumbuh dari, oleh, dan untuk masyarakat, dan bertujuan untuk Meningkatnya kesadaran masyarakat dalam kehidupan berbangsa dan bernegara di dalam wadah negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan UUD 1945, Meningkatnya partisipasi masyarakatdalam perencanaan, pelaksanaan, dan pengendali pembangunan, Meningkatnya kemampuan masyarakat sebagai Sumber Daya Manusia (SDM) untuk mengolah dan memanfaatkan potensi Sumber Daya Alam (SDA) terutama dalam bidang Agrobisnis dan Pariwisata, Meningkatnya ekonomi kerakyatan dalam upaya pengentasan kemiskinan. Selain meningkatkan partisipasi dan pelayanan penyelenggaraan bagi masyarakat, LPM juga ikut serta didalam perencanaan, pelaksanaan dan pembangunan yang dilakukan oleh Pemerintah Desa.

Begitu juga dengan program-program yang dijalankan pemerintah harus terus berorientasi pada kepentingan rakyat, oleh sebab itu dalam pelaksanaanya sangat dipengaruhi oleh kemampuan aparatur yang ada didaerah. Sasarannya adalah manusia yang merupakan kunci dari pelaksanaan pembangunan tersebut. Pemberdayaan masyarakat terutama dipedesaan tidak cukup hanya dengan upaya meningkatkan produktivitas, memberikan kesempatan usaha yang sama atau memberimodal saja, tetapi harus diikuti pula dengan perubahan struktur sosial ekonomi masyarakat,mendukung berkembangnya potensi masyarakat melalui peningkatan peran, produktivitas dan efisiensi. Berikut adalah tabel kegiatan pembangunan di kampung tualang yang melibatkan lembaga pembeerdayaan masyarakat.

Tabel 1. 1

Program Perencanaan Pembangunan di Kampung Tualang Tahun 2022 s/d 2023

No	Program Perencanaan Pembangunan	Tahun	Sumber Dana	Keterangan
1.	Perbaikan lapangan sepakbola	2022	APBD Kampung	Terealisasi
2.	Pembangunan air irigrasi	2022	APBD Kampung	Terealisasi
3.	Pembngunan taman di sekitar lapangan sepakbola	2022	APBD Kampung	Terealisasi
4.	Pelebaran jalan	2022	APBD Kampung	Belum Terealisasi

5.	Pengerasan badan jalan	2022	APBD Kampung	Belum Terealisasi
6.	Pelebaran jalan	2023	APBD Kampung	Terealisasi
7.	Pengerasan badan jalan	2023	APBD Kampung	Terealisasii
8.	Pebaikan jalan belubang	2023	APBD Kampung	Terealisasi
9.	Pembangunan parit	2023	APBD Kampung	Terealisasi
10.	Pemasangan lampu jalan	2023	APBD Kampung	Terealisasi

Sumber : Kantor Penghulung Kampung Tualang

Ada beberapa program pembangunan yang belum terealisasikan pada tahun 2022 karena terdapat beberapa kendala seperti lemahnya koordinasi antar pemangku kepentingan juga menjadi faktor penyebab pembangunan tidak terealisasi tepat waktu. Lemahnya koordinasi antar pemangku kepentingan dapat menghambat pengambilan keputusan yang diperlukan dalam pelaksanaan proyek pembangunan. Kendala di berbagai tahapan proyek, dan lemahnya koordinasi antar pemangku kepentingan menjadi faktor penyebab pembangunan tidak terealisasi tepat waktu. Oleh karena itu, diperlukan upaya-upaya untuk mengatasi faktor-faktor tersebut agar pembangunan dapat terealisasi tepat waktu serta karena kegiatan pembangunan dikerjakan pada akhir tahun dan di lanjutkan pembangunan di awal tahun berikutnya di tahun 2023. Ssehingga proses pembangunan yang belum terealisasi di tahun 2022 dapat di selesaikan atau terealisasikan pada tahun 2023. Serta ada beberapa kegiatan pembangunan yang masih dalam proses pengerjaan dikarena pelaksanaanya baru di dilakukan pada awal bulan september estimasi selesainnya pembangunan yang peneliti ketahui dari informan target pengerjaan ini sendiri akan selesai sebelum akhir tahun 2023 ini. Hubungan LPM dengan pemerintah kampung harus sealu baik begitu juga dengan masyarakat agar pembangunan berjalan dengan baik juga.Namun, terkadang masyarakat kurang berpatisipasi dalam pembangunan , maka dari itu sangat dibutuhkan strategi peran LPM dalam menyikapi masalah tersebut agar masyarakat merasa diberdayakan dan akhirnya mau berpatisipasi dalam pembangunan sehingga tercapai pembangunan kampung yang baik dan tepat sasarann sesuai dengan kebutuhan masyarakat.

Tinjauan Pustaka

Peran berarti sesuatu yang dimainkan atau dijalankan. Peran didefinisikan sebagai sebuah aktivitas yang diperankan atau dimainkan oleh seseorang yang mempunyai kedudukan atau status sosial dalam organisasi. Peran menurut terminology adalah seperangkat tingkah yang diharapkan dimiliki oleh yang berkedudukan dimasyarakat. Dalam bahasa inggris peran disebut "role" yang definisinya adalah "person's task or duty in undertaking". Artinya "tugas atau kewajiban seseorang dalam suatu usaha atau pekerjaan". Peran diartikan sebagai perangkat tingkah yang diharapkan dimiliki oleh orang yang berkedudukan dalam masyarakat. Sedangkan peranan merupakan tindakan yang dilakukan oleh seorang dalam suatu peristiwa. Peran adalah aktivitas yang dijalankan seseorang atau suatu lembaga/organisasi. Peran yang harus dijalankan oleh suatu lembaga/organisasi biasanya diatur dalam suatu ketetapan yang merupakan fungsi dari lembaga tersebut. Peran itu ada dua macam yaitu peran yang diharapkan (expected role) dan peran yang dilakukan

(actual role). Dalam melaksanakan peran yang diembannya, terdapat faktor pendukung dan penghambat.

Pengertian peran menurut Soerjono Soekanto (2015:210), yaitu peran merupakan aspek dinamis kedudukan (status), apabila seseorang melaksankan hak dan kewajibannya sesuai dengan kedudukannya, maka ia menjalankan suatu peranan. Peran merupakan aspek yang dinamis dari kedudukan (status). Apabila seorang yang melakukan hak dan kewajibannya sesuai dengan kedudukannya maka dia menjalankan suatu peran. Sedangkan kewajiban adalah segala sesuatu yang harus dilakukan oleh setiap orang dalam menjalankan kehidupannya. Dalam kamus bahasa Indonesia juga dijelaskan bahwa peran adalah tindakan yang dilakukan oleh seseorang dalam suatu peristiwa. Kemudian upaya-upaya yang harus dilakukan perempuan di era reformasi, demokratisasi dan otonomi daerah ini, harus menjadi momentum penting bagi perempuan, baik di tingkat regional maupun nasional, berpartisipasi aktif dalam menentukan kebijakan, bulat dan lonjongnya demokrasi dalam kehidupan berbangsa dan bernegara, yang selama ini lebih banyak ditentukan orang lain, sementara perempuan hanya menerima akibat yang tidak menguntungkan.

Adapun pembagian peran menurut Soekanto dibagi menjadi 3 yaitu sebagai berikut:

a. Peran Aktif Peran aktif adalah peran yang diberikan oleh anggota kelompok karena kedudukannya di dalam kelompok sebagai aktivitas kelompok, seperti pengurus, pejabat, dan lainnya sebagainya.
b. Peran Partisipatif Peran partisipatif adalah peran yang diberikan oleh anggota kelompok kepada kelompoknya yang memberikan sumbangan yang sangat berguna bagi kelompok itu sendiri.
c. Peran Pasif Peran pasif adalah sumbangan anggota kelompok yang bersifat pasif, dimana anggota kelompok menahan dari agar memberikan kesempatan kepada fungsi-fungsi lain dalam kelompok sehingga berjalan dengan baik

Hakekatnya peran dapat dirumuskan sebagai suatu rangkaian perilaku tertentu yang ditimbulkan oleh suatu jabatan tertentu bagi individu atau kelompok dalam melakukan dan menentukan sesuatu sesuai dengan kedudukan yang dimilikinya. Seseorang, kelompok atau lembaga dapat dikatakan telah melaksanakan peran atau berperan dalam suatu hal ketika ia telah menjalankan tugas dan tanggung jawabnya sesuai dengan posisi atau kedudukannya.

Berdasarkan konsep teori yang telah dikemukakan, Lembaga Pemberdayaan Masyarakat (LPM) merupakan wadah aspirasi dan partisipasi masyarakat dalam suatu pembangunan yang bertumpu pada pemberdayaan masyarakat, yang berperan sebagai fasilitator, mediator, motivator, dan dinamisator

Metode

Jenis penelitian ini adalah penelitian deskripif kualitatif yaitu prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis dari orang-orang dan perilaku yang dapat diamati atau dilihat serta dari berbagai literatur-literatur menyangkut Peran Lembaga Pemberdayaan Masyarakat dalam Pembangunan Kampung. Penelitian kualitatif adalah suatu proses penelitian untuk memahami fenomena-fenomena manusia atau sosial dengan menciptakan gambaran yang menyeluruh dan kompleks yang dapat disajikan dengan kata-

kata, melaporkan pandangan terinci yang diperoleh dari sumber informan, serta dilakukan dalam latar setting yang alamiah (Walidin, Saifullah & Tabrani, 2015: 77)

Sumber data yang diperoleh dalam penelitian ini menggunakan data primer yaitu data yang diperoleh berdasarkan wawancara langsung kepada narasumber dengan acuan pedoman wawancara dan data sekunder yaitu data yang diperoleh dari orang lain atau lewat dokumen, peneliti menggunakan jurnal, buku, artikel yang berkaitan dengan penelitian serta berita online yang terkait yang dijadikan sebagai sumber sekunder.

Penelitian ini menggunakan metode observasi dan wawancara karena melihat pada proses mengamati orang dalam lingkungannya, berinteraksi dengan mereka, berusaha memahami bahasa dan tafsiran mereka tentang dunia sekitarnya sehingga bisa melihat peengaruh penelitian ini.

Hasil dan Pembahasan

Berdasarkan konsep teori yang telah dikemukakan, Lembaga Pemberdayaan Masyarakat (LPM) merupakan wadah aspirasi dan partisipasi masyarakat dalam suatu pembangunan yang bertumpu pada pemberdayaan masyarakat, yang berperan sebagai fasilitator, mediator, motivator, dan dinamisator. Berikut dilihat dengan indikator sebagai berikut:

Fasilitator, merancang dan menyampaikan aspirasi masyarakat Lembaga

Fasilitator merupakan orang yang memberikan bantuan atau menjembatani setiap mereka yang ingun menyampaikan setiap apa saja yang dibutuhkan oleh orang banyak serta dalam memperlancar proses komunikasi sekelompok orang, sehingga mereka dapat memahami atau memecahkan masalah bersama-sama. Peran Lembaga Pemberdayaan Masyarakat yang disebut sebagai fasilitator adalah LPM sendiri memfasilitasi dan mendampingi segala aktivitas masyarakat yang menyangkut dengan program pembangunan dan kemasyarakatan di Kampung. Peranan LPM sebagai fasilitator adalah memfokuskan pada mendampingi masyarakat dengan menampung aspirasi masyarakat dalam proses melakukan kegiatan perencanaan pembangunan dan kemasyarakatan.

Mediator, mensosialisasikan hasil dari rencana pembangunan desa

LPM sebagai mediator dalam pembangunan yang dimaksudkan adalah memiliki tugas untuk mensosialisasikan hasil- hasil usulan rencana pembangunan yang sudah ditetapkan dan dijadikan Rancangan Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) kepada semua elemen masyarakat. Kegiatan sosialisasi ini termasuk di dalamnya sosialisasi kegiatan, seperti pihak-pihak yang terkait yang akan diminta partisipasi dan keterlibatannya, pembagian peran yang diharapkan, pendekatan serta langkah- langkah selanjutnya. Upaya mengkomunikasikan rencana kegiatan pembangunan yang telah dimusyarawahkan dapat melalui sosialisasi kerumah- rumah warga desa dan juga melalui bentuk undangan rapat atau sejenisnya yang memiliki tujuan dan fungsi yang sama. Tujuan kegiatan ini adalah agar semua elemen masyarakat mengenal dan paham tentang rumusan perencanaan pembangunan desa.

Motivator, mendorong masyarakat untuk berpartisipasi dalam kegiatan pembangunan desa.

Motivator dipandang sebagai ujung tombak dan pionir pembangunan maka tantangannya adalah bagaimana membentuk para motivator-motivator pemberdayaan masyarakat. Motivator

dalam hal ini dapat berupa tokoh yang ada dimasyarakat maupun segenap aparat pemerintahan yang ada di desa. Sehingga peran motivator sangat penting dan strategis. Lembaga Pemberdayaan Masyarakat (LPM) menempatkan diri sebagai motivator yaitu memotivasi masyarakat untuk berpartisipasi dalam kegiatan pembangunan diwilayahnya, membantu masyarakat dalam mengartikulasikan kebutuhannya, membantu mengidentifikasi masalah, mengembangkan kapasitas agar dapat menangani masalah, meyakinkan pembuat keputusan untuk mendengar, mempertimbangkan, peka terhadap kebutuhan masyarakat melakukan pertemuan atau musyawarah, dan membantu kelompok masyarakat memperoleh akses pelayanan yang dibutuhkan.

Dinamisator, berperan menimbulkan atau menjadikan sesuatu menjadi terus bergerak atau berubah (dinamika) dalam kegiatan pembangunan

Kata dinamisator berasal dari kata dinamis yang berarti merujuk kepada segala sesuatu atau kondisi yang terus menerus berubah, bergerak secara aktif dan mengalami perkembangan yang berarti. Sedangkan dinamisator merupakan seseorang atau sesuatu yang menimbulkan atau menjadikan sesuatu menjadi terus bergerak atau berubah (dinamika). Agar dapat berlangsung pembangunan yang ideal, maka pemerintah, swasta dan masyarakat harus dapat bersinergi dengan baik. LPM berperan untuk mensinergiskan ketiga pihak tersebut, sehingga diantaranya tercipta suatu simbiosis mutualisme demi perkembangan pembangunan. Sebagai dinamisator LPM harus mampu menggerakkan masyarakat dan melakukan pengembangan kepada masyarakat desa. Dengan begitu kegiatan pembangunan desa akan berjalan dengan optimal.

Kesimpulan

Berdasarkan 4 indikator peranan lembaga pemberdayaan masyarakat yaitu sebagai Fasilitator, Mediator, Motivator dan Dinamisator penulis menyimpulkan bahwasannya peran Lembaga Pemberdayaan Masyarakat (LPM) sebagai fasilitator masih rendah karena partisipasi masyarakat dalam menentukan prioritas program yang ingin dibuat masih kurang. Ini mungkin menunjukkan bahwa ada kekurangan dalam komunikasi atau kesempatan yang diberikan kepada masyarakat untuk berkontribusi dalam proses pengambilan keputusan, Peran Lembaga Pemberdayaan Masyarakat (LPM) sebagai mediator telah berjalan dengan baik. Hal ini terlihat dari tingginya partisipasi masyarakat dalam rapat, menunjukkan kesadaran mereka akan pentingnya program yang dibuat oleh LPM untuk kesejahteraan masyarakat. Ini bisa menjadi hasil dari upaya LPM dalam membangun hubungan yang kuat dengan masyarakat dan menyampaikan nilai-nilai program yang mereka usulkan, Peran Lembaga Pemberdayaan Masyarakat (LPM) sebagai motivator dinilai sudah baik, namun hasil pembangunan masih rendah dalam hal perawatan oleh masyarakat. Kurangnya perhatian masyarakat terhadap perawatan fisik bangunan yang telah dibangun menunjukkan bahwa meskipun LPM berhasil memotivasi masyarakat dalam proses pembangunan, namun tantangan berikutnya adalah mempertahankan motivasi tersebut untuk menjaga hasil pembangunan serta juga peran LembagaPemberdayaan Masyarakat (LPM) sebagai dinamisator belum berjalan dengan baik. Tidak adanya evaluasi yang dilakukan oleh pengurus LPM setelah selesainya program pemerintah menandakan kurangnya dinamisme dalam memastikan keberlanjutan dan keberhasilan program. Tanggapan masyarakat dan fasilitator yang menyatakan bahwa penilaian terhadap hasil program sepenuhnya diserahkan kepada masyarakat menunjukkan kurangnya pengawasan dan keterlibatan aktif dari LPM dalam memastikan kualitas dan dampak positif dari program-program pembangunan.

Daftar Pustaka

Buku dan Jurnal:

Adon, Nasrullah Jamaludin. 2016. Sosiologi Pembangunan. Bandung: CV Pustaka Setia

Aguswan, Nurfeni. 2018. Model Perencanaan Partisipatif Pembangunan Desa, Surabaya: Jakat Publishing

Chozin, dkk. 2010. Pembangunan Perdesaan dalam Rangka Peningkatan Kesejahteraan Masyarakat. Bogor: IPB Press

Jones, P. 2009. Pengantar Teori-Teori Sosial: Dari Fungsionalisme hingga Post-modernisme. Yayasan Pustaka Obor Indonesia

Lexy J. Moleong. 2010. Metodologi Penelitian Kualitatif. Bandung: Remaja Rosdakarya

Mahi, I. A. K., Trigunarso, S. I., & SKM, M. K. 2017. Perencanaan Pembangunan Daerah Teori dan Aplikasi. Kencana.

Nofriansyah, D. 2018. Penelitian Kualitatif: Analisis kinerja lembaga pemberdayaan masyarakat kelurahan. Deepublish.

Robinson, Tarigan. 2006. Perencanaan Pembangunan Wilayah. Malang: Bumi Aksara

Siagian, Sondang P. 2003. Filsafat Administrasi. Jakarta, Bumi Aksara

Siagian, Sondang P. 2017. Administrasi Pembangunan : Konsep, Dimensi, dan Strateginya. Jakarta, PT. Bumi Aksara.

Handrian, E., & Andry, H. (2020). Sustainable Development Goals: Tinjauan Percepatan Pencapaian di Provinsi Riau. *PUBLIKA: Jurnal Ilmu Administrasi Publik*, *6*(1), 77-87.

Handrian, E., Muslikhah, U., & Rosmita, R. (2024). Diffusion of Application Policy Innovation Pekan Kita (PEKA) in Pekanbaru City. *Jurnal Administrasi Publik*, *15*(1).

Andry, H., & Handrian, E. (2017, November). E-Implementation of E-Government In Regional Financial Management (Study at the Regional Finance and Asset Management Board of Riau Province). In *International Conference on Democracy, Accountability and Governance (ICODAG 2017)* (pp. 152-155). Atlantis Press.

Handrian, E., Rosmita, R., & Suriani, L. (2023). Inclusive Development for Marginal Group Street Trader in Tembilahan Indragiri Hilir District. *Jurnal Administrasi Publik*, *14*(1).

Handrian, E. (2019). Pengaruh Reformasi Birokrasi Terhadap Kualitas Pelayanan Pembuatan Surat Izin Mengemudi Golongan C (Sim C) Pada Sat Lantas Polresta Pekanbaru. *Publika: Jurnal Ilmu Administrasi Publik*, *5*(1), 137-155.

Handrian, E., & Andry, H. (2020). Penguatan Pemerintahan Daerah Dalam Pengelolaan Kawasan Perbatasan Di Kabupaten Kepualauan Meranti. *Jurnal Kemunting*, *1*(2), 183-203.

Handrian, E., & Hawa, S. (2022). Implementasi program pengembangan perikanan tangkap

pada Dinas Pertanian dan Perikanan Kota Pekanbaru. *JIAP (Jurnal Ilmu Administrasi Publik)*, *10*(1), 49-58.

Nurman, Yusriadi, Y., & Hamim, S. (2022). Development of pluralism education in Indonesia. *Journal of Ethnic and Cultural Studies*, *9*(3), 106-120.

Nasri, H., Nurman, N., Azwirman, A., Zainal, Z., & Riauan, I. (2022). Implementation of collaboration planning and budget performance information for special allocation fund in budget planning in the regional development planning agency of Rokan Hilir regency. *International Journal of Health Sciences (IJHS) Ecuador*, *6*(S4), 639-651.

Nurman, N., Zainal, Z., & Rajasa, Y. (2021). Good Governance in Structure Belantik Raya People's Market in Siak District. *Jurnal Kajian Pemerintah: Journal of Government, Social and Politics*, *7*(2), 1-11.

Nurman, M. P. (2015). Strategi Pembangunan Daerah.

Rusli, R., & Nurman, N. (2016). Implementasi Fungsi Koordinasi Camat Dalam Pembuatan Kartu Keluarga Dan Kartu Tanda Penduduk Di Kecamatan Dumai Barat Kota Dumai. *Jurnal Kajian Pemerintah: Journal of Government, Social and Politics*, *2*(1), 27-39.

Parjiyana, P. (2015). Implementasi Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 128 Tahun 2004 Tentang Kebijakan Dasar Pusat Kesejatan Masyarakat. *Jurnal Kajian Pemerintah: Journal of Government, Social and Politics*, *1*(2), 41-54.

Fista, L., & Parjiyana, P. (2024). Pelaksanaan Fungsi Kepala Desa Dalam Pembinaan Kemasyarakatan Di Desa Kuantan Babu Kecamatan Rengat Kabupaten Indragiri Hulu. *Journal of Public Administration Review*, *1*(1), 26-36.

Parjiyana, P., Nazir, Y., Wedayanti, M. D., & Mardianto, M. (2019). Peranan Kepala Dusun Dalam Membantu Tugas Kepala Desa Kubang Jaya Kecamatan Siak Hulu Kabupaten Kampar. *PUBLIKA: Jurnal Ilmu Administrasi Publik*, *5*(2), 198-205.

Afhissa, C., & Parjiyana, P. (2017). Analisis Pelaksanaan Fungsi Pengawasan Pimpinan di Balai Diklat Lingkungan Hidup dan Kehutanan (BDLHK) Pekanbaru. *PUBLIKA: Jurnal Ilmu Administrasi Publik*, *3*(2), 207-223.

Marcella, A., & Parjiyana, P. (2018). ANALISIS PELAYANAN UMUM DI PERUSAHAAN DAERAH AIR MINUM (PDAM) TIRTA INDRA KABUPATEN INDRAGIRI HULU. *PUBLIKA: Jurnal Ilmu Administrasi Publik*, *4*(1), 17-35.

Suriani, L., Nisa, K., & Affandi, L. H. (2023). Pelaksanaan Projek Penguatan Profil Pelajar Pancasila Tema Gaya Hidup Berkelanjutan di Sekolah Dasar. *Jurnal Educatio FKIP UNMA*, *9*(3), 1458-1463.

Suriani, L., & Lumintang, G. (2018). Pengaruh Kompensasi, Disiplin Kerja Dan Etika Kerja Terhadap Kinerja Karyawan Di Pt. Transindo Jaya Bahari Maumbi Manado. *Jurnal EMBA: Jurnal Riset Ekonomi, Manajemen, Bisnis dan Akuntansi*, *6*(4).

Suriani, L., & Sidabutar, O. J. (2019). Kualitas Pelayanan Dan Peraturan Tata Tertib

Perpustakaan Terhadap Kepuasan Pemustaka Di Perpustakaan Soeman Hs. *PUBLIKA: Jurnal Ilmu Administrasi Publik*, *5*(2), 190-197.

Handrian, E., Rosmita, R., & Suriani, L. (2023). Inclusive Development for Marginal Group Street Trader in Tembilahan Indragiri Hilir District. *Jurnal Administrasi Publik*, *14*(1).

Syafitri, I., & Suriani, L. (2019). Peran Kepemimpinan Kepala Desa Dalam Pelaksanaan Pembangunan Di Desa Sejati Kecamatan Rambah Hilir Kabupaten Rokan Hulu. *PUBLIKA: Jurnal Ilmu Administrasi Publik*, *5*(1), 44-54.

Hamim, S., Vianda, L., & Pitaloka, S. (2020). Penerapan Prinsip Prinsip Pelayanan Publik Di Bidang Pelayanan Pendaftaran Penduduk Dan Catatan Sipil Dinas Kependudukan Dan Catatan Sipil Kota Pekanbaru. *PUBLIKA: Jurnal Ilmu Administrasi Publik*, *6*(1), 1-10.

Adnan, I. M., & Hamim, S. (2013). Administrasi, Organisasi Dan Manajemen Suatu Ilmu, Teori, Konsep Dan Aplikasi.

Hamim, S. (2005). Sistem Perencanaan Strategis Dalam Pembangunan.

Adnan, I. M., & Hamim, S. (2013). Administrasi, Organisasi Dan Manajemen Suatu Ilmu, Teori, Konsep Dan Aplikasi.

Adnan, I. M., & Hamim, S. (2014). Filsafat Ilmu, Ilmu Pengetahuan dan Penelitian.

Andry, H., & Yussa, A. T. (2015). Perilaku dan Etika Administrasi Publik. *Pekanbaru: Marpoyan Tujuh Publishing*.

Handrian, E., & Andry, H. (2020). Sustainable Development Goals: Tinjauan Percepatan Pencapaian di Provinsi Riau. *PUBLIKA: Jurnal Ilmu Administrasi Publik*, *6*(1), 77-87.

Andry, H. (2017). Pelayanan Publik Pengurusan Izin Mendirikan Bangunan Di Kecamatan Mandau Oleh Dinas Tata Kota, Tata Ruang Dan Pemukiman Kabupaten Bengkalis. *PUBLIKA: Jurnal Ilmu Administrasi Publik*, *3*(1), 66-79.

Andry, H., & Zulkifli, Z. (2023). Evaluasi pengelolaan parkir oleh dinas perhubungan kota pekanbaru. *Eqien-Jurnal Ekonomi Dan Bisnis*, *12*(02), 194-205.

Andry, H., Herman, H., & Rahmah, J. (2023). PELAKSANAAN KOORDINASI DINAS KESEHATAN KOTA PEKANBARU DAN BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH KOTA PEKANBARU DALAM PENGHAPUSAN ASET KENDARAAN DINAS OPERASIONAL KHUSUS (AMBULANCE). *Jurnal Ilmu Sosial dan Ilmu Politik (JISIP)*, *12*(1), 18-28.

Abdullah, S., Hamim, S., & Ermayuna, S. (2021). Stretegi Pembangunan Pertanian Tanaman Pangan Di Lahan Gambut Desa Pulau Palas Kabupaten Indragiri Hilir. *Pascasarjana Ilmu Administrasi Universitas Islam Riau*, 1-83.

Anggara, B., & Abdullah, S. (2017). Pelaksanaan Pengawasan Dinas Perindustrian Dan Perdagangan Kota Pekanbaru Dalam Pendistribusian Gas Lpg 3 Kg Di Kota Pekanbaru. *PUBLIKA: Jurnal Ilmu Administrasi Publik*, *3*(2), 248-261.

Ariswanto, N. S., & Abdullah, S. (2016). Analisis Pelaksanaan Kewenangan Badan

Permusyawaratan Desa (Bpd) Di Desa Berumbung Baru Kecamatan Dayun Kabupaten Siak. *PUBLIKA: Jurnal Ilmu Administrasi Publik*, *2*(2), 197-215.

Herman, H., Kartius, K., Abdullah, S., & Hasibuan, C. R. (2024). Collaborative GovernanceIn Overcoming Unemployment in Bengkalis Regency, Riau Province. *PERSPEKTIF*, *13*(1), 164-173.

Abdullah, S., & Safri, I. (2023). Pemberdayaan Masyarakat Dalam Mengelola Potensi Masyarakat Desa Kampung Panjang Kabupaten Kampar. *Masyarakat Berdaya dan Inovasi*, *4*(2), 242-248.

Nurmasari, N., & Al Hafis, R. I. (2019). Desentralisasi Asimetris: Kemiskinan ditengah kelimpahan otonomi khusus papua. *JPAP: Jurnal Penelitian Administrasi Publik*, *5*(2), 1180-1192.

Nurmasari, N., Komalasari, E., Mulianto, B., Nurman, N., & Amrillah, M. F. (2024). PELATIHAN INOVASI BANK SAMPAH PLASTIK UNTUK PENINGKATAN PENDAPATAN EKONOMI MASYARAKAT DI BANK SAMPAH PUAN SARI MANDIRI. *Jurnal ADAM: Jurnal Pengabdian Masyarakat*, *3*(1), 35-40.

Kurniawan, R., & Nurmasari, N. (2017). Analisis Kinerja Pegawai Pada Bidang Pelayanan Dan Informasi Di Badan Penanaman Modal Dan Pelayanan Perizinan Terpadu Kabupaten Siak. *PUBLIKA: Jurnal Ilmu Administrasi Publik*, *3*(1), 122-134.

Afringgo, R., Nurmasari, N., & Zubaidah, E. (2021). Efektifitas E-Warong sebagai Sarana Pengintegrasian Tujuan Program Keluarga Harapan pada Kelompok Target KUBE Berkah Harapan di Kota Pekanbaru. *Jurnal Ranah Publik Indonesia Kontemporer (Rapik)*, *1*(1), 22-29.

Nurmasari, N., & Wedayanti, M. D. (2018, August). HUMAN RESOURCE MANAGEMENT CIVIL SERVANT EMPLOYEES IN THE FRAMEWORK OF REFORM BUREAUATION IN RIAU PROVINCE. In *ICSScE 2018*.

Herman, H., Suriani, L., & Farisha, N. (2021). Evaluasi Kebijakan Pengelolaan Sarana dan Prasarana Sampah Pada Pasar Milik Pemerintah Kota Pekanbaru. *Publikauma: Jurnal Administrasi Publik Universitas Medan Area*, *9*(2), 81-90.

Herman, H. (2019). Pelaksanaan Corporate Social Responsibility Oleh Stakeholders Primer Dan Skunder Di Riau. *Jurnal Ilmiah Manajemen Publik Dan Kebijakan Sosial*, *2*(2).

Herman, H., & Novarizal, R. (2017). Faktor-faktor ideal perusahaan dalam pelaksanaan CSR (Corporate Social Responsibity). *Sisi Lain Realita*, *2*(2), 39-53.

Nengsih, I. A., & Herman, H. (2019). Strategi Pelayanan Izin Praktek Doketer Pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kota Pekanbaru. Asketik, 3 (2), 163–175.

Novarizal, R., & Herman, H. (2019). Pengamanan Lembaga Pemasyarakatan Terhadap Kemungkinan Terjadinya Pelarian (Studi Kasus Lapas Kelas II A Pekanbaru): Universitas Islam Riau. *Sisi Lain Realita*, *4*(1), 90-102.

Suri, D. M. (2017). Analisis faktor yang mempengaruhi implementasi kebijakan penertiban dan pembinaan gelandangan dan pengemis di kota pekanbaru. *PUBLIKA:*

Jurnal Ilmu Administrasi Publik, *3*(1), 89-101.

Suri, D. M., & Nurmandi, A. (2021, July). Deep learning methods as a detection tools for forest fire decision making process fire prevention in Indonesia. In *International Conference on Human-Computer Interaction* (pp. 177-182). Cham: Springer International Publishing.

Suri, D. M., Nurmandi, A., Qodir, Z., & Al Fadhat, F. (2021). Narrative Policy Framework: The Role Of Media Narrative Towards Forest And Land Fire Policy In Indonesia. *Universitas Muhammadiyah Yogyakarta*.

Hildawati, H., & Suri, D. M. (2020). Potensi UEK-SP Kelurahan Rimba Sekampung Untuk Transformasi Menjadi Lembaga Keuangan Mikro (LKM) Di Kota Dumai. *PUBLIKA: Jurnal Ilmu Administrasi Publik*, *6*(1), 24-42.

Yogia, M. A., & Suri, D. M. (2020). Implementasi Kebijakan Pemberdayaan Masyarakat Melalui Program Usaha Ekonomi Kelurahan. *Sosio Konsepsia*, *9*(03), 247-256.

Al Hafis, R. I., & Yogia, M. A. (2017). Abuse of power: Tinjauan terhadap penyalahgunaan kekuasaan oleh pejabat publik di Indonesia. *Publika: Jurnal Ilmu Administrasi Publik*, *3*(1), 80-88.

Hafis, A., Imam, R., Hakim, A., & Haryono, B. S. (2014). Aktor Pelaksana Pengelolaan Transportasi Publik Perkotaan (Studi Kasus Bus Trans Metro Di Kota Pekanbaru). *Jurnal Wacana*, *16*(4), 171-178.

Al Hafis, R. I. (2018). Pembangunan Daerah Perbatasan Yang Terabaikan: Kajian Perbatasan Kecamatan Rupat Utara Kabupaten Bengkalis–Selat Malaka. *Gema Publica*, *3*(2), 111-119.

Al Hafis, R. I., Warsono, H., Larasati, E., & Purnaweni, H. (2021). The paradox of collaborative governance in leprosy rehabilitation in Central Java. *Management and Entrepreneurship: Trends of Development*, *3*(17), 55-67.

Al Hafis, R. I., Wardana, D., Setiawati, S., & Putra, A. I. (2024). Proses Collaborative Governance untuk Mengurangi Dampak Abrasi. *Kaganga: Jurnal Pendidikan Sejarah dan Riset Sosial Humaniora*, *7*(1), 521-529.

Lubis, E. F., & Zubaidah, E. (2020). Efektivitas Program Keluarga Harapan Dalam Penanggulangan Kemiskinan. *Societas: Jurnal Ilmu Administrasi dan Sosial*, *9*(2), 88-99.

Zubaidah, E., & Lubis, E. F. (2021). Inovasi Layanan Aplikasi e-Samsat Dalam Pembayaran Pajak Kendaraan Bermotor Di Provinsi Riau. *Jurnal Niara*, *14*(2), 120-125.

Zubaidah, E. (2018). Analisis Manajemen Perkantoran Dalam Meningkatkan Kinerja Pegawai PT. Pegadaian Persero Kantor Wilayah II Pekanbaru. In *Prosiding Seminar Nasional Pendidikan Administrasi Perkantoran*.

Zubaidah, E., Nurmandi, A., Pribadi, U., Hidayati, M., & Lubis, E. F. (2022, March). The Factors Influencing the Community to Use E-Service in Pekanbaru City, Indonesia. In *International Conference on Public Organization (ICONPO 2021)* (pp. 310-318). Atlantis Press.

Zubaidah, E. (2016). MANAJEMEN PANTI ASUHAN DALAM PERSPEKTIF HENRI FAYOL:(STUDY KASUS PANTI ASUHAN USMAN BIN AFFAN). *VALUTA*, *2*(1), 130-139.

Wedayanti, M. D., Nurmandi, A., Jubba, H., & Pulungan, B. I. (2022). Political Interaction Strategy Corporate Social Responsibility of PT Riau Andalan Pulp and Paper in Riau Province, Indonesia. *International Journal of Sustainable Development & Planning*, *17*(8).

Wedayanti, M. D., & Susanti, H. (2019). Pengembangan Pariwisata Berbasis Masyarakat (CBT) Menggunakan Kontribusi Corporate Social Responsibility (CSR) di Pekanbaru Provinsi Riau. *WEDANA: Jurnal Kajian Pemerintahan, Politik dan Birokrasi*, *5*(2), 32-37.

Wedayanti, M. D., Nurmandi, A., Jubba, H., & Juliana, S. (2021, January). Implementation of Corporate Social Responsibility in PT. Riau Andalan Pulp and Paper in Pelalawan District, Riau Province. In *INCEESS 2020: Proceedings of the 1st International Conference on Economics Engineering and Social Science, InCEESS 2020, 17-18 July, Bekasi, Indonesia* (p. 71). European Alliance for Innovation.

Wedayanti, M. D., & Zulkifli, Z. (2015). Pelaksanaan Pengawasan Barang dan Jasa Beredar Oleh Seksi Perlindungan Konsumen Pada Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Pekanbaru. *PUBLIKA: Jurnal Ilmu Administrasi Publik*, *1*(1), 52-72.

Parjiyana, P., Nazir, Y., Wedayanti, M. D., & Mardianto, M. (2019). Peranan Kepala Dusun Dalam Membantu Tugas Kepala Desa Kubang Jaya Kecamatan Siak Hulu Kabupaten Kampar. *PUBLIKA: Jurnal Ilmu Administrasi Publik*, *5*(2), 198-205.

Lubis, E. F., & Zubaidah, E. (2020). Efektivitas Program Keluarga Harapan Dalam Penanggulangan Kemiskinan. *Societas: Jurnal Ilmu Administrasi dan Sosial*, *9*(2), 88-99.

Lubis, E. F., & Zubaidah, E. (2019). Efektivitas Program Pemberdayaan Masyarakat Berbasis Rukun Warga (PMB-RW) Dalam Mewujudkan Prinsip Tridaya Di Kota Pekanbaru. *PUBLIKA: Jurnal Ilmu Administrasi Publik*, *5*(2), 156-163.

Lubis, E. F. (2015). Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Pelaksanaan Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Pedesaan (Pnpm Mpd)(Studi Kasus: Kegiatan Simpan Pinjam Perempuan Di Nagari Tanjung Betung Kabupaten Pasaman). *PUBLIKA: Jurnal Ilmu Administrasi Publik*, *1*(2), 304-317.

Lubis, E. F., & Indira, T. T. (2023). PENGARUH STORE ATMOSPHERE TERHADAP KEPUASAN KONSUMEN PADA AYAM PENYET CINDELARAS BAGAN BATU KABUPATEN ROKAN HILIR. *PubBis: Jurnal Pemikiran dan Penelitian Administrasi Publik dan Administrasi Bisnis*, *7*(1), 1-9.

Lubis, E. E. F. (2024). PELATIHAN PEMBUATAN SABUN CUCI PIRING UNTUK MENINGKATKAN TAMBAHAN PENDAPATAN PADA IBU-IBU KELOMPOK MELATI PUTIH DALAM PROGRAM KELUARGA HARAPAN DI KECAMATAN SUKAJADI KOTA PEKANBARU. *Multidisciplinary Indonesian Center Journal (MICJO)*, *1*(1), 120-126.

Herman, H., Kartius, K., Abdullah, S., & Hasibuan, C. R. (2024). Collaborative GovernanceIn Overcoming Unemployment in Bengkalis Regency, Riau Province. *PERSPEKTIF*, *13*(1), 164-173.

Handrian, E., Rosmita, R., Suriani, L., & Kartius, K. (2022). Reformasi Badan Usaha Milik Desa Kesumbo Sejahtera di Desa Kesumbo Ampai Kabupaten Bengkalis. *Jurnal Mandala Pengabdian Masyarakat*, *3*(2), 231-237.

Kurniawan, A. (2020). Pengaruh Kepemimpinan Diri Sendiri Terhadap Sikap Wirausaha Pada Usaha Makanan Tradisional Di Desa Palung Raya Kecamatan Tambang Kabupaten Kampar. *PUBLIKA: Jurnal Ilmu Administrasi Publik*, *6*(2), 179-191.

Kurniawan, A., Rezki, D., & Riau, U. I. (2023). Collaborative Governance Dalam Menangulangi Banjir di Kota Sungai Penuh Collaborative Governance in Overcoming Floods in the City of Sungai Penuh. *Jurnal Penelitian Administrasi Publik*, *9*(1), 1-18.

TARMIZI, A., KURNIAWAN, A., ADERISKA, M., & AFRIZAL, T. (2022). Analysis of Quality Electronic Identity Card Service in Sub-District West Meral of Karimun District, Riau Islands (Integrated Sub-District Administration Service Model "Paten"). *International Journal of Society, Development and Environment in the Developing World*, *6*, 62-72.

Tarmizi, A., & Kurniawan, A. (2017). Model Administrasi Pribumi Masyarakat Adat Melayu Petalangan di Desa Sialang Godang Kabupaten Pelalawan Riau. In *Seminar Nasional "Mitigasi dan Strategi Adaptasi Dampak Perubahan Iklim di Indonesia* (pp. 165-177).

Yusa, A. T., Andry, H., & Kurniawan, A. (2016). Restorasi Paradigma KUD:" Pendekatan Teori Organisasi Dalam Merebut Peluang MEA".

Yunisman, Y., Salioso, H., Febrianto, S., Prayuda, R., & Mardatillah, A. (2022). Analysis of quality of animal health services by veterinary medical and veterinary paramedic services in food security and agricultural agency of Rokan Hilir Regency. *International Journal of Health Sciences*, *14*(3), 1030-1046.

Larasati, D., Indrastuti, S., Salioso, H., Yussa, H. A., & Suri, D. M. (2022). Analysis of the effect of job satisfaction and job motivation on the performance of cleaning officers at the environmental service agency Rokan Hilir district Indonesia. *International Journal of Health Sciences*, *6*(4), 573-588.

Salioso, H. (2016). ASN, OTDA, Politik Pilkada Serentak dan Korupsi di Indonesia. *SISI LAIN REALITA*, *1*(1), 01-07.

Adha, M. L., & Salioso, H. (2024). KINERJA ORGANISASI DI KANTOR PENCARIAN DAN PERTOLONGAN BASARNAS KELAS A PEKANBARU. *JURNAL KEMUNTING*, *5*(1), 1-16.

Askarial, A., Rinaldi, K., & Salioso, H. (2016). Kota Dumai Dalam Pidato Seorang Walikota.

Siagian H, 1989. Pokok-pokok Pembangunan Masyarakat Desa. Bandung. Soekanto, Soerjono. 2007. Sosiologi Suatu Pengantar. PT. Raja Grafindo, Jakarta

Soekanto, Soerjono. 2013. Sosiologi Suatu Pengantar. Rajawali Pers: Jakarta

Sugiono. 2013. Metodologi penelitian Kualitatif, Kuantitatif, dan (Mixed Metode).(Bandung: Alfabeta)

Sumardi, Suryabrata. 1995. Metodologi Penelitian. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada

Sutha, D. W. 2018. Administrasi Perkantoran. Sidoarjo: Indomedia Pustaka.

Suharto, Edi. 2006. Membangun Masyarakat Memberdayakan Rakyat. Bandung.

Suharto, Edi. 2010. Membangun Masyarakat Memberdayakan Rakyat. Bandung.

Sumaryadi, I Nyoman, 2005. Perencanaan Pembangunan Derah Otonom dan Pemberdayaan Masyarakat. Jakarta, Penerbit Citra Utama.

Sumodiningrat, Gunawan. 2007. Pemberdayaan Sosial. Jakarta, Kompas.

Sunyoto, Usman. 2004. Pembangunan Dan Pemberdayaan Masyarakat. Yogyakarta, Pustaka Pelajar.

Suyanto, Bagong. 2005. Metode Penelitian Sosial : Berbagai Alternative Pendekatan.Jakarta, Prenada Media

Syafiie, Inu Kencana. 2003. Sistem Administrasi Negara Republik Indonesia (SANRI). Jakarta, Bumi Aksara

Syafri, Wirwan, 2012. Studi Tentang Administrasi Publik. Jakarta, Penerbit Erlangga Syani, Abdul, 1995. Sosiologi dan Perubahan Masyarakat. Lampung, Pustaka Jaya.

Walidin, Saifullah & Tabrani, 2015: 77

Wibowo. 2016. Kepemimpinan Pemahaman Dasar, Pandangan Konvensional, Gagasan Kontemporer. Depok, PT. RajaGrafindo Persada

Widjaja, Prof. Drs. HAW, 2003. Otonomi Desa Merupakan Otonomi Yang Asli, Bulat dan Utuh. Jakarta, PT. Raja Grafindo Persada.